



RUMUSAN
COACHING CLINIC KERJA BARENG JEMPUT BOLA
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

═══════════ ❁❁❁❁ ❁❁❁❁ ═══════════

- Hari/Tanggal : Selasa-Rabu/25-26 Juni 2019
- Tempat : Hotel Horison Ultima, Kota Palembang
- Fasilitator : 1. Rahmat (Pokja PPS Nasional/TP2PS)
2. Edo (Pokja PPS Nasional/TP2PS)
3. Jasnari (Pokja PPS Nasional/TP2PS)
- Narasumber : 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
2. Ketua Pokja PPS Provinsi Sumatera Selatan
3. Kasubdit Penyiapan Hutan Kemasyarakatan
4. Kasi Penyiapan Kemitraan Kehutanan Wilayah II
5. Kasi Penyiapan Hutan Kemasyarakatan Wilayah I
- Peserta : 1. Direktorat PKPS
2. Pokja PPS Nasional
3. BPSKL Wilayah Sumatera
4. BPKH Wilayah II Palembang
5. BKSDA Sumatera Selatan
6. BPDASHL Musi
7. BPHP Wilayah V Palembang
8. BPPIKHL Wilayah Sumatera
9. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
10. Pokja PPS Provinsi Sumatera Selatan
11. KPH Wilayah I Meranti
12. KPH Wilayah II Lalan Mendis
13. KPH Wilayah III Palembang-Banyuasin
14. KPH Wilayah IV Sungai Lumpur
15. KPH Wilayah V Lempuing - Mesuji
16. KPH Wilayah VI Bukit Nanti - Martapura
17. KPH Wilayah VII Mekakau - Saka
18. KPH Wilayah VIII Semendo
19. KPH Wilayah IX Suban Jeriji
20. KPH Wilayah X Dempo
21. KPH Wilayah XI Kikim - Pasemah
22. KPH Wilayah XII Benakat
23. KPH Wilayah XIII Lakitan - Bukit Cogong
24. KPH Wilayah XIV Rawas
25. PT. Musi Hutan Persada
26. PT. Paramitra Mulia Langgeng
27. PT. Buana Sriwijaya Sejahtera
28. HAKI
29. WRI Indonesia
30. PINUS
31. Lingkar Hijau
32. ZSL
33. Solidaritas Perempuan

HASIL PEMBAHASAN

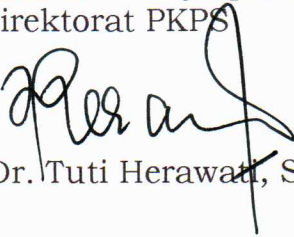
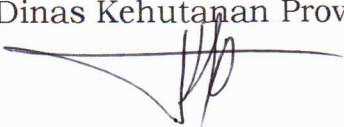
Memperhatikan Arahan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Arahan Direktur PKPS, penjelasan Narasumber, serta hasil diskusi peserta Coaching Clinic Kerja Bareng Jemput Bola Percepatan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Target pemberian akses legal Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 adalah seluas 40.000 ha. Sedangkan realisasi pemberian akses legal Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan periode 1 Januari s.d 31 Mei 2019, baru mencapai ± 1.739 ha.
2. Diperlukan upaya percepatan pemberian akses legal Perhutanan Sosial melalui kegiatan fasilitasi penyusunan dokumen permohonan dan verifikasi teknis lapangan dengan melibatkan Direktorat PKPS, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Balai PSKL Wilayah Sumatera, POKJA PPS Prov. Sumatera Selatan, UPT Teknis Kementerian LHK di Provinsi Sumatera Selatan, KPH se-Sumatera Selatan, LSM, dan Lembaga akademisi melalui kerja bareng jemput bola.
3. Hasil pencermatan dan telaahan terhadap sasaran lokasi kegiatan *coaching clinic* kerja bareng jemput bola percepatan Perhutanan Sosial, disepakati sasaran lokasi untuk dilakukan fasilitasi usulan seluas ± 7.105 Ha dan sasaran lokasi untuk dilakukan verifikasi teknis seluas ± 11.354 ha, sebagaimana terlampir.
4. Untuk fasilitasi usulan dan verifikasi teknis ke lapangan telah ditetapkan jadwal waktu dan pembagian tim personil dengan melibatkan unsur-unsur: 1). Direktorat PKPS; 2) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; 3) BPKH Wilayah II Palembang; 4) Balai PSKL Wilayah Sumatera; 5) Pokja PPS Provinsi Sumatera Selatan; dan 6) KPH Terkait, sebagaimana terlampir.
5. Output pelaksanaan fasilitasi usulan adalah berupa dokumen permohonan izin akses legal Perhutanan Sosial yang lengkap, sesuai dengan peraturan dan faktual sesuai fakta lapangan. Sedangkan output pelaksanaan Verifikasi Teknis adalah berupa Berita Acara Verifikasi Teknis yang valid dan faktual sesuai fakta lapangan, baik subyek maupun obyeknya, dengan memberikan rekomendasi yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
6. Program percepatan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Selatan sangat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh karakter masing-masing wilayah. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan Pemerintah Daerah (kebijakan dan pendanaan) dan kepercayaan pusat untuk mulai memberikan pendelegasian kewenangan perhutanan sosial kepada Daerah agar proses akselerasinya bisa berjalan dengan optimal.
7. Banyaknya potensi, usulan dan perizinan perhutanan sosial dilahan gambut saat ini masih terkendala dalam pengembangannya karena masih menunggu adanya Peraturan Menteri LHK yang terkait dengan pengaturan perhutanan sosial di lahan gambut sebagai rujukan dan panduan operasionalnya.
8. Bukti komitmen dan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap otonomi dan peningkatan peran perhutanan sosial di daerah diwujudkan dengan memberikan alokasi anggaran berupa DAK (Dana Alokasi Khusus) yang akan direalisasikan pada tahun 2020. Kewenangan KLHK terkait pengelolaan kehutanan saat

ini dinilai masih cukup sentralistik, serta diperlukan pembagian peran dan kewenangan kepada daerah.

9. Masih di temui permasalahan/konflik tenurial di lapangan pasca terbitnya izin, dibutuhkan fasilitasi dan mediasi multipihak pada semua tahapan yang bisa dilakukan oleh Pokja PPS Provinsi Sumatera Selatan dengan dukungan Balai PSKL Wilayah Sumatera dan Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat.
10. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang cukup progresif dalam pengembangan Perhutanan Sosial, hal ini dibuktikan antara lain dengan adanya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Perhutanan Sosial, dibentuknya Tim Pemetaan Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Hutan Adat (TPKTKHHA), adanya Tim Kerja Revisi PIAPS, dan pemetaan Perhutanan Sosial yang bekerja dibawah supervisi Pokja PPS Sumatera Selatan. Lahirnya Pergub PS Sumsel menjadi salah satu bentuk komitmen Daerah terhadap pengembangan PS.
11. Proses Pengusulan Skema Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan mengedepankan koordinasi dengan KPH sebagai pengelola kawasan dilevel tapak, termasuk diantaranya Peta lampiran calon lokasi izin yang di mohonkan melalui /diketahui KPH, hal ini untuk memperkecil permasalahan dan menimbulkan konflik baru.


Menetahui:

1. Kasubdit Penyiapan HKm
Direktorat PKPS

(Dr. Tuti Herawati, S.Hut, M.Si)
2. Kasi Perhutanan Sosial
Dinas Kehutanan Prov. Sumsel

(Hasanuddin, S.H, M.M)

Palembang, 26 Juni 2019

Tim Perumus:


1. Rahmat Hidayat (TP2PS)


2. Edo (TP2PS)


3. Jasnadi (TP2PS)


4. Gunadi Firdaus (Dit. PKPS)

Lampiran Rumusan

Sasaran Lokasi, Pembagian Tim dan Tata Waktu Pelaksanaan Fasilitas Usulan dan Verifikasi Teknis

No.	KPH	Tim	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Pemohonan	Luas (Ha)	Skema	Waktu
A. FASILITASI USULAN									
1	KPH Wilayah VI Bukit Nanti - Martapura	Kasduan (Dinas); Bahtera (KPH); Bejoe (Pokja)	OKU	Lengkiti	Karang Endah	Gapoktanhut Way Batuau	2,378.00	HKm	27 s/d 29 Juni 2019
2	KPH Wilayah VII Mekakau - Saka	Winarsi (Dinas); Ketut (KPH); Jendri (Pokja)	OKU	Sungai Are	Bumi Kawa	Gapoktanhut Suka Alam Lestari	1,000.00	HKm	27 s/d 30 Juni 2019
			OKU Selatan	Pulau Beringin	Tanah Pilih	KTH Tani Sejahtera	365.00	HKm	
			OKU Selatan	Pulau Beringin	Tanjung Bulan Ulu	KTH Jaya Bersama	338.00	HKm	
			OKU Selatan	Mekakau Ilir	Aromatai	KTH Aromantai Makmur	837.00	HKm	
			OKU Selatan	Sungai Are	Selabung Belimbing	KTH Selabung Jaya	325.00	HKm	
3	KPH Wilayah XI Kikim - Pasemah	Mega Utami (Dinas); Dedy Harianto (KPH); Farizal Pulungan (Pokja)	Empat Lawang	Tebing Tinggi	Guntung Jaya	KTH Maju Bersama	-	HKm	27 s/d 30 Juni 2019
			Empat Lawang	Tebing Tinggi	Rantau Tenang	KTH Bukit Shorea	35.00	HKm	
			Empat Lawang	Tebing Tinggi	Rantau Tenang	KTH Tebing Michelia	25.00	HKm	
			Empat Lawang	Tebing Tinggi	Kel Jaya Loka	KTH Sengkuang Jaya	30.00	HKm	
			Empat Lawang	Tebing Tinggi	Dterusan Baru	KTH Sinar Harapan	95.00	HKm	
			Lahat	Tanjung Sakti PUMI	Tanjung Sakti	KTH Mespala Tasti	100.00	HKm	
			Empat Lawang	Pasemah Air Keruh	Talang Padang	KTH Pematang Lingkung	617.00	HKm	
4	KPH Wilayah IX Suban Jeriji	Agus Mustofa (Dinas); Muhaimin (Pokja); Monsefti (KPH)	Empat Lawang	Pasemah Air Keruh	Talang Padang	KTH Sungai Geruntang	359.00	HKm	27 s/d 30 Juni 2019
			Lahat	Merapi Barat	Ulak Pandan	KTH Bukit Selero	150.00	HKm	
			Lahat	Merapi Barat	Ulak Pandan	KTH Pelancu	50.00	HKm	
			Muara Enim	Rambang	Sugihan	KTH Mitra Tani Senuling Talang Lubuk Umang	30.00	HKm	
			Muara Enim	Rambang	Sugihan	KTH Mitra Tani Senuling Talang Pengadangan 1	60.00	HKm	
			Muara Enim	Rambang	Sugihan	KTH Mitra Tani Senuling Talang Pengadangan 2	62.00	HKm	
			Muara Enim	Tanjung Agung	Muara Emil	KTH Talang 30	73.50	HKm	
			Muara Enim	Tanjung Agung	Muara Emil	KTH Talang Tebing Petai	76.00	HKm	
			Pagar Alam	Pagar Alam Utara	Dempo Makmur	KTH Dempo Lestari	100.00	HKm	
			JUMLAH A:						

B. VERIFIKASI TEKNIS

1	KPH Wilayah I Meranti	Andi Zaim (PKPS); Zike (BPSKL); Bambang Irawan (KPH); Boni S. Bangun (Pokja); Nur Kholis (Dinas)	Musi Banyuasin	Batanghari Leko	Pangkalan Bulian	Gapoktan Mitra Bersama Sejahtera	890.64	HTR	26 s/d 30 Juli 2019
			Musi Banyuasin	Batanghari Leko	Pangkalan Bulian	Gapoktan Sungai Merah Lestari	770.94	HTR	
2	KPH Wilayah II Lalan	Timo (PSKL); Pramoe Wibowo (Dinas); Sony (BPSKL); Romi (KPH); Rani (Pokja)	Musi Banyuasin	Bayung Lencir	Muara Medak	Koperasi Bina Bersama Nusantara	4,364.81	KK	26 s/d 30 Juli 2019
			Musi Banyuasin	Bayung Lencir	Muara Merang	Gapoktanhut Mandiri Sejahtera	1,144.00	KK	
			Musi Banyuasin	Bayung Lencir	Muara Merang	Gapoktanhut Kumala Hijau Lestari	1,266.94	KK	
3	KPH Wilayah III Palembang-Banyuasin	Iswandi (PKPS); Arwindo (Dinas); Arinda (Pokja); Dyah (BPSKL); Beni Rahmad (KPH)	Musi Banyuasin	Bayung Lencir	Muara Merang	KTH Hikmah Putra Bungsu	509.27	KK	
			Banyuasin	Rantau Bayur	Lubuk Rengas	Gapoktanhut Rengas Sejahtera	175.00	KK	26 s/d 30 Juli 2019
			Banyuasin	Tanjung Lago	Desa Manggar Jaya	KTH Pran Rimau Makmur	292	KK	
			Banyuasin	Tanjung Lago	Desa Riamu Sungsang	KTH Subur Makmur	1,081	KK	
4	KPH Wilayah VI Bukit Nanti - Martapura	Dimas (PKPS); Resa (PSKL); Victor (BPSKL); Edward Bastian (KPH); Sudiri (KPH); Badrun Zaini (BPKH); Sutiyono (BPKH); Ekawati (Pokja); Herno Trisulo (Dinas); Zamhari (Dinas)	OKU Timur	Buay Pemuka Peliung	Bantan	Gapoktanhut Putra Nepal	134.00	HKm	26 s/d 30 Juli 2019
			OKU Timur	Buay Pemuka Peliung	Negeri Pakuan	Gapoktanhut Pakuan Jaya	376.00	HKm	
			OKU Timur	Buay Pemuka Peliung	Bantan Pelitan	Gapoktanhut Pelita Jaya	148.00	HKm	
			OKU Timur	Martapura	Kel Veteran Jaya	KTH Suka Makmur	120.00	HKm	
			OKU Timur	Martapura	Kel Sungai Tuha Jaya	KTH Mawar Wangi	82.00	HKm	
							11,354.60		
							18,460.10		